

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah yang diatur oleh Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014, bahwa penyelenggaraan pemerintahan daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, dan kekhasan suatu daerah.

Otonomi daerah yang diterapkan di Indonesia sampai saat ini merupakan wujud dari diberlakukannya desentralisasi. Desentralisasi ini diharapkan menghasilkan dua manfaat nyata. Dua manfaat desentralisasi adalah peningkatan partisipasi dan perbaikan alokasi sumberdaya produktif (Mardiasmo, 2018: 99). Otonomi daerah menurut UU No. 23 Tahun 2014 merupakan hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang undangan. Tujuan utama dari penyelenggaraan otonomi daerah adalah untuk meningkatkan pelayanan publik (*public service*) dan memajukan perekonomian daerah. Selain itu, otonomi daerah bertujuan untuk memandirikan daerah dengan potensi-potensi yang dimiliki daerah.

Pemerintah daerah dalam praktek penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan publik, harus pula diiringi dengan penerapan prinsip *Good governance* (kepemerintahan atau tata pemerintahan yang baik). *Good governance* merupakan proses penyelenggaraan kekuasaan dalam menyediakan barang dan jasa publik (*public goods dan services*). Menurut Halim (2014: 104), Prinsip-prinsip *Good governance* antara lain adalah Akuntabilitas (*accountability*), Keterbukaan dan transparansi (*openness and transparency*), Ketaatan pada hukum dan Partisipasi Masyarakat dalam kegiatan pembangunan.

Anggaran publik berisi rencana kegiatan yang direpresentasikan dalam rencana perolehan pendapatan dan belanja dalam satuan moneter. Anggaran publik merupakan suatu dokumen yang menggambarkan kondisi keuangan dari suatu organisasi yang meliputi mengenai pendapatan, belanja dan aktivitas (Mardiasmo, 2018: 75). Anggaran sektor publik penting karena memiliki beberapa alasan, antara lain yaitu anggaran sebagai alat bagi pemerintah sebagai pengarah pembangunan, anggaran sangat diperlukan karena adanya kebutuhan dan keinginan masyarakat yang tak terbatas dan terus berkembang dan anggaran sebagai alat untuk meyakinkan masyarakat bahwa pemerintah telah bertanggung jawab terhadap pembangunan.

Analisis kinerja keuangan bertujuan untuk mengukur dan mengevaluasi kinerja pemerintah, mengukur potensi pendapatan atau sumber ekonomi, mengetahui kondisi keuangan, mengetahui kemampuan

pemerintah dalam memenuhi kewajibannya, dan menyakini bahwa pemerintah telah melaksanakan anggaran sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Salah satu alat untuk menganalisis kinerja keuangan adalah dengan rasio keuangan. Analisis rasio keuangan terdiri dari rasio kemandirian, rasio desentralisasi, rasio efisiensi, rasio efektifitas, dan rasio pertumbuhan.

Rasio kemandirian menggambarkan ketergantungan daerah terhadap sumber dana eksternal. Semakin tinggi rasio kemandirian maka tingkat ketergantungan daerah terhadap bantuan pihak eksternal semakin rendah. Rasio kemandirian dapat menunjukkan tingkat partisipasi masyarakat dalam pembangunan daerah. Semakin tinggi rasio kemandirian maka semakin tinggi partisipasi masyarakat dalam membayar pajak dan retribusi daerah yang merupakan komponen PAD.

Rasio derajat desentralisasi menggambarkan jumlah pendapatan asli daerah dengan total penerimaan daerah. Semakin tinggi kontribusi PAD maka semakin tinggi Kemampuan pemerintah daerah dalam penyelenggaraan desentralisasi.

Rasio efektivitas menggambarkan kemampuan pemerintah daerah dalam merealisasikan PAD yang direncanakan dibandingkan dengan target yang di tetapkan berdasarkan potensi riil daerah. Semakin tinggi rasio efektivitas maka kemampuan pemerintah daerah juga semakin baik.

Rasio efisiensi ekonomi menggambarkan besarnya biaya yang dikeluarkan atas pendapatan pada pemerintah daerah. Semakin rendah rasio efisiensi maka semakin efisien kinerja keuangan pemerintah daerah.

Rasio pertumbuhan (*growth ratio*) menunjukkan kemampuan pemerintah daerah dalam mempertahankan dan meningkatkan keberhasilan yang telah dicapai dari periode ke periode berikutnya. Komponen-komponen APBD (PAD, Belanja, Utang dan sebagainya) yang perlu mendapat perhatian sebaiknya melihat terlebih dahulu pertumbuhan komponen-komponen tersebut.

Pola hubungan pemerintah pusat dengan pemerintah daerah menggambarkan sejauh mana pihak pemerintah pusat yang berperan atas kinerja pemerintah daerah. Semakin tinggi kemampuan kinerja daerahnya maka semakin mandiri dalam pengelolaan keuangan daerahnya. Tingkat kemampuan dapat dilihat dari perhitungan rasio kemandiriannya.

Penelitian ini merupakan replika dari penelitian yang dilakukan oleh Sundari dan Supratiningrum (2015) dengan operasional variabel derajat desentralisasi, Rasio kemandirian daerah, Rasio efektifitas PAD dan Rasio keserasian belanja daerah. Sampel yang digunakan dalam penelitian Sundari dan Supratiningrum (2015) adalah Laporan Realisasi APBD Kota Semarang tahun 2009-2013, Sedangkan peneliti menggunakan sampel Laporan Realisasi APBD tahun 2015-2017 Pemerintah Kota Surakarta.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, peneliti melakukan penelitian dengan judul: “**ANALISIS KINERJA KEUANGAN DAN KEMAMPUAN DAERAH DALAM PELAKSANAAN OTONOMI DAERAH PADA PEMERINTAH KOTA SURAKARTA TAHUN ANGGARAN 2015-2017**”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka rumusan masalahnya adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana kinerja keuangan Pemerintah Kota Surakarta pada tahun 2015-2017?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, maka tujuan penelitian yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk menganalisa dan mengetahui pertumbuhan, kemandirian, efektivitas dan efisiensi kinerja keuangan daerah Kota Surakarta tahun 2015-2017.

D. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi pihak-pihak berikut ini:

- a. Bagi Peneliti

Untuk mengembangkan akuntansi sektor publik, khususnya dalam menilai kinerja keuangan Pemerintah daerah.

- b. Bagi Pemerintah Daerah

Diharapkan dapat menjadi tolok ukur dan bahan pertimbangan pengambilan keputusan yang terkait dengan kinerja keuangan Pemda, baik jangka pendek maupun jangka panjang.

c. Bagi Pembaca dan Peneliti selanjutnya

Penelitian ini diharapkan dapat sebagai bahan untuk mengkaji lebih lanjut kinerja keuangan pemerintah daerah.